

BAB 3

PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN FILIPINA DI JEPANG

3.1 Pekerja Migran Perempuan di Jepang

3.1.1 Masuknya Pekerja Migran Perempuan ke Jepang

Pada kasus migrasi pekerja migran ke Jepang, pekerja migran perempuan tiba terlebih dahulu daripada pekerja migran laki-laki. Hal ini berkebalikan dengan pandangan pada umumnya yaitu normalnya laki-laki yang bermigrasi lebih dahulu dan perempuan mengikuti mereka sebagai orang yang memiliki ketergantungan. Yoko Sellek (2001) menyatakan bahwa ada lima hal yang berkaitan mengenai kemunculan pekerja asing perempuan di Jepang. Munculnya pekerja migran di Jepang pertama kali muncul pada akhir tahun 1970an. Hal ini ditandai dengan adanya pekerja migran perempuan yang berasal dari Asia Tenggara (sebagian besar berasal dari Thailand dan Filipina) serta Asia Timur (Korea Selatan dan Taiwan). Pada akhir tahun 1985, mayoritas dari pekerja ilegal di Jepang adalah perempuan (Sellek, 2001, hal.160-161).

Kedua, pada pertengahan dan akhir tahun 1980an di mana muncul pekerja migran perempuan ilegal dalam jumlah besar yang berasal dari Filipina dan Thailand. Kedua negara ini merupakan penyalur pekerja migran perempuan ilegal ke Jepang. (Tabel 3.1). Pada tahun 1990-an, jumlah pekerja migran perempuan ilegal paling banyak dari Thailand dan selanjutnya dari Filipina (Kajita, 1994, hal.135).

Ketiga, industri hiburan memiliki hubungan yang penting dengan munculnya migrasi perempuan ke Jepang dan mayoritas dari pekerja migran perempuan yang bekerja di bidang hiburan dengan visa untuk bekerja di bidang tersebut berasal dari Filipina (pekerja legal yang telah mendapatkan izin kerja di luar negeri). Walaupun jenis pekerjaan yang dapat diisi oleh pekerja migran perempuan semakin banyak seperti pekerja manufaktur, pegawai restoran, pekerja domestik, tetap ada konsentrasi dari pekerja migran perempuan yang bekerja di

bidang hiburan. Sebagian besar pekerja perempuan tersebut berasal dari Filipina dan Thailand.

Keempat, sebagian besar dari pekerja migran perempuan itu ialah perempuan yang tinggal melebihi batas waktu dari yang telah tertera di visa (*overstayer*). Pada mulanya mereka masuk ke Jepang menggunakan visa untuk menetap dalam waktu singkat, tapi ada pula pekerja migran perempuan Filipina yang dikontrak dan menggunakan visa bekerja di bidang hiburan (*entertainment*).⁴

Kelima, mayoritas dari pekerja migran perempuan yang bekerja di Jepang tersebut ialah perempuan yang masih muda, memiliki kebebasan yang masuk ke Jepang sebagai individu yang belum terikat. Usia mereka terkonsentrasi antara 15 hingga 20 tahun dan antara 20 hingga 30 tahun. Jumlah pekerja migran perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pekerja migran laki-laki. (Sellek, 2001, 160-161).

Dengan demikian, dari pernyataan Yoko Sellek di atas dapat disimpulkan bahwa pekerja migran perempuan yang masuk ke Jepang dapat pula dibagi jenisnya menjadi dua, yaitu yang masuk secara legal dengan dokumen resmi atau sah dan secara ilegal dengan dokumen yang tidak sah atau tinggal melebihi masa tinggal yang tertera di visa (*overstayer*).

3.1.2 Faktor Pendorong Migrasi Pekerja Perempuan ke Jepang

Ada dua faktor yang menyebabkan para perempuan migran bekerja di Jepang. Pertama, adanya konteks perbedaan upah yang besar antara Jepang dengan negara Asia yang lain, bekerja di industri hiburan Jepang memiliki arti sebagai perbaikan yang besar bagi keadaan finansial mereka dan keluarganya walaupun dalam kasus pekerja migran, mereka harus menghadapi resiko terdeportasi. Sejak sekitar tahun 1992, migran perempuan dari Eropa Timur dan

⁴ Kategori bagi pekerja perempuan yang bekerja dengan visa hiburan (*entertainment visa*) diperuntukkan bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pertunjukan teater, musik, olah raga dan bisnis pertunjukkan yang lain. Sesungguhnya, visa jenis ini digunakan bagi penyalur untuk memasukkan pekerja migran perempuan ke dunia bisnis seks dan hiburan. Faktanya, kebanyakan penyanyi dan penari yang bekerja menggunakan visa ini hanya memiliki waktu tampil yang sedikit dan menjalani pekerjaan mereka dengan menyajikan minuman kepada tamu serta berbincang-bincang dengan mereka atau pada dasarnya bekerja sebagai pelayan (*hostess*). (Komai:1993,73)

Amerika Selatan mulai bekerja di industri hiburan. Di bawah pengaruh globalisasi, bekerja di industri hiburan telah diakui secara global sebagai pilihan yang umum untuk memperbaiki keadaan finansial secara cepat.

Kedua, konsentrasi dari pekerja perempuan dalam industri hiburan dapat dinyatakan sebagai respon terhadap kebijakan pemerintah Jepang yang melarang pekerja migran bekerja di bidang pekerjaan tidak ahli (*unskilled job sectors*). Sebagai akibatnya, pekerja migran perempuan di Jepang tidak dapat menemukan pekerjaan lain sebagai alternatif. Akhirnya mereka pun memiliki kecenderungan untuk bekerja di bidang industri hiburan. Faktanya, sejak akhir tahun 1980an, jumlah pekerja migran perempuan yang bekerja di bidang industri manufaktur, jasa dan komersial meningkat, bersamaan dengan masuknya gelombang pekerja migran laki-laki. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa jenis pekerjaan dari pekerja migran perempuan di Jepang akan lebih banyak jenisnya begitu pula dengan kesempatan yang muncul bagi mereka untuk bekerja di industri lain selain industri hiburan (Sellek, 2001, hal.170).

3.1.3 Jumlah Pekerja Migran Perempuan yang Masuk ke Jepang

Tabel 3.1. Pekerja Migran Illegal Menurut Asal Negara dan Jenis Kelamin (1980-1998)

Tahun	Jenis Kelamin	Korea Selatan	Thailand	Filipina	Taiwan
1981	P	37	223	288	641
	L	12	28	14	107
1982	P	132	412	409	775
	L	35	25	13	84
1983	P	114	557	1.041	528
	L	24	39	29	85
1984	P	61	1.132	2.983	466
	L	34	54	96	136
1985	P	76	1.073	3.927	427
	L	35	120	349	125
1986	P	119	990	6.297	356
	L	69	164	1.500	161
1987	P	208	1.067	8.027	494
	L	109	290	2.253	210
1988	P	1.033	1.388	5.386	492
	L	769	369	1.688	223
1989	P	3.129	1.144	3.740	531
	L	2.209	369	1.289	275

1990	P	5.534	1.450	4.042	639
	L	4.417	661	1.593	351
1991	P	9.782	3.249	2.983	460
	L	8.283	926	1.079	225
1992	P	13.890	7.519	3.532	656
	L	11.204	2.408	1.466	374
1993	P	11.865	12.654	4.617	674
	L	8.473	5.160	2.246	347
1994	P	10.730	10.654	5.260	601
	L	6.694	4.600	2.414	315
1995	P	10.529	6.948	5.476	474
	L	6.089	3.185	2.168	231
1996	P	11.444	5.561	5.646	437
	L	6.446	2.568	2.409	198
1997	P	10.346	4.483	5.067	557
	L	5.074	1.936	2.117	208
1998	P	9.360	3.604	5.631	429
	L	4.173	1.579	2.122	154

Sumber: Kementerian Kehakiman, Biro Imigrasi Jepang, Statistik Tahunan Imigrasi (Sellek: 2001, 32-33)

Keterangan: Jumlah 'pekerja migran ilegal' berasal dari jumlah pekerja migran yang ditemukan terkait dengan pekerjaan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan status mereka serta pekerja migran yang kelebihan masa tinggalnya (*overstayer*) yang juga terkait dengan jenis pekerjaan yang sama.

Tabel di atas menyatakan jumlah pekerja migran ilegal di Jepang menurut jenis kelamin dan asal negara dengan jangka waktu 18 tahun (tahun 1981-1998). Dari jangka waktu tersebut, dapat dibagi menjadi dua, yaitu tahun 1980an dan tahun 1990an. Peningkatan yang signifikan terjadi pada Filipina dan puncaknya pada tahun 1987, jumlah pekerja perempuan migran ilegalnya mencapai 8.027 orang. Sedangkan pada Korea Selatan dan Thailand, keduanya mengalami peningkatan perlahan-lahan. Pada awal tahun 1990an, jumlah pekerja migran perempuan ilegal dari masing-masing negara mengalami fluktuasi. Puncak tertinggi dari Korea Selatan ada pada tahun 1992 (13.890 orang) dan Thailand ada pada tahun 1993 (12.654 orang). Sementara Filipina juga mengalami fluktuasi, tapi tidak signifikan. Pada tahun 1995-1998 jumlah pekerja migran perempuan ilegalnya cenderung stagnan. Sedangkan Taiwan menjadi negara yang tingkat perubahan dari jumlah pekerja migran perempuan ilegalnya tidak terlalu besar, cenderung stagnan dengan jumlah yang tidak lebih dari 700 orang.

Tabel 3.2. Pekerja Migran Illegal Menurut Asal Negara dan Jenis Kelamin
(2000-2004)

Asal Negara	Jenis Kelamin	2000	2001	2002	2003	2004
Filipina	L	2.524	1.222	1.313	1.453	2.263
	P	4.896	1.678	2.383	2.655	4.036
Korea Selatan	L	4.262	3.461	3.249	2.564	2.281
	P	7.074	4.939	4.794	3.808	3.911
Thailand	L	1.460	1.222	1.054	1.030	1.179
	P	2.442	1.678	1.484	1.393	1.652

Sumber: Kementerian Kehakiman, Biro Imigrasi Jepang, Laporan Pengawasan Imigrasi
(*Immigration Control Report: 2005, 57*)

Sesuai tabel di atas, pada tahun 2000-2004 ketiga negara yang memiliki pekerja migran perempuan illegal mengalami fluktuasi dalam jumlahnya. Baik Filipina, Korea Selatan dan Thailand mengalami penurunan jumlah dari tahun 2000 ke 2001. Kemudian pada tahun selanjutnya, yang mengalami peningkatan jumlah hanya Filipina (2.383) dan terus meningkat jumlahnya sampai tahun 2004. Sedangkan Korea Selatan cenderung mengalami penurunan jumlah tiap tahunnya. Thailand mengalami peningkatan jumlah pada tahun 2004 menjadi 1.652 orang walau pun pada tahun-tahun sebelumnya dapat dikatakan stagnan.

3.1.4 Jenis Pekerjaan Bagi Pekerja Migran Perempuan di Jepang

Tabel 3.3 Jenis Pekerjaan Pekerja Migran Perempuan Illegal di Jepang
(1988-1998)

Jenis Pekerjaan	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Pelayan Bar (<i>Hostess</i>)	4.704	3.559	2.605	3.518	5.030	7.007	7.413	6.389	6.236	6.392	6.762
Pekerja Pabrik (<i>Factory Worker</i>)	165	323	614	1.087	2.549	3.466	3.139	2.551	2.547	2.222	2.088
Pekerja Prostitusi (<i>Prostitute</i>)	-	-	-	611	1.606	1.913	1.176	595	484	-	-

Pencuci Piring (<i>Dishwasher</i>)	-	-	-	592	1.333	1.520	1.530	1.409	1.128	1.005	892
Pelayan Restoran (<i>Waitress</i>)	-	-	-	371	1.062	1.507	2.242	2.648	2.631	2.459	2.349
Juru Masak (<i>Cook</i>)	-	-	-	-	567	664	626	709	797	886	670
Pembantu (<i>Maid</i>)	-	-	-	264	-	-	-	-	-	-	-
Buruh (<i>Labourer</i>)	120	276	374	-	502	927	800	616	363	328	-
Pekerja Jasa (<i>Service Worker</i>)	-	-	-	-	486	682	687	835	1000	849	684
Penjaga Toko (<i>Shopkeeper</i>)	105	227	46	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	291	432	1.046	1.115	1.505	1.511	1.710	1.576	1.439	1.682	2.282
Jumlah	5.385	4.817	4.685	7.558	14.640	19.197	19.323	17.328	16.625	15.823	15.727

Sumber: Kementerian Kehakiman, Biro Imigrasi Jepang (Sellek, 2001, hal.53)

Keterangan:

1. Tahun 1990, data ditulis sesuai dengan 4.869 orang pekerja migran perempuan yang jenis pekerjaannya diketahui dari jumlah keseluruhan pekerja migran perempuan yang bekerja di Jepang sebanyak 5.708 orang.
2. "Buruh" (*labourer*) mengacu pada pekerja manual selain dari pekerja konstruksi (*construction workers*), teknisi listrik (*electrical workers*), dan pekerja di bidang transportasi (*transport workers*). Pada prakteknya, pekerja dalam kategori ini utamanya bekerja sebagai tukang sapu (*sweepers*) atau pengumpul sampah (*rubbish collector*).
3. Pekerja di bidang jasa (*service worker*) mengacu pada pekerja migran perempuan yang terikat pada pekerjaan mengurus rumah (*housekeeping*) dan mengurus toko (*shopkeeping*).
4. Tanda (-) mengindikasikan jumlah terpisah dari pekerja migran perempuan ilegal ini tidak tersedia. Pada beberapa kasus, jumlah pekerja yang termasuk dalam beberapa jenis pekerjaan tersebut dimasukkan dalam kategori "lain-lain". Bagaimana pun juga, jumlah dari penjaga toko (*shopkeeper*) dan pembantu (*maid*) dari tahun 1992 sampai 1998 disadari untuk dimasukkan ke dalam jenis pekerja jasa (*service worker*).

Dari tabel jenis pekerjaan bagi pekerja migran perempuan ilegal di Jepang, jenis pekerjaan yang paling banyak diisi oleh mereka dalam kurun waktu 11 tahun (1988-1998) adalah sebagai pelayan bar (*hostess*). Puncaknya terdapat pada tahun 1994, dimana terdapat jumlah pekerja migran perempuan ilegal paling banyak (7.413) dan pekerja migran perempuan ilegal yang mengisi posisi sebagai pelayan bar (*hostess*) sebesar 7.413. Jenis pekerjaan yang tertinggi kedua

yang diisi oleh para pekerja migran perempuan illegal selain sebagai pelayan bar (hostess) adalah sebagai pekerja pabrik (*factory worker*) yang puncak tertingginya mencapai 3.466 orang pada tahun 1993. Sedangkan jenis pekerjaan yang paling sedikit diisi adalah pekerjaan sebagai penjaga toko (*shopkeeper*).

Tabel 3.4 Jenis Pekerjaan Pekerja Migran Perempuan Illegal di Jepang
(2000-2004)

Jenis Pekerjaan	2000	2001	2002	2003	2004
Pelayan Bar (Hostess)	9.056	5.647	4.845	4.873	6.368
Pekerja Pabrik (Factory Worker)	2.510	2.203	1.903	2.010	3.038
Juru Masak (Cook)	896	683	756	689	1.001
Pelayan Restoran (Waitress)	2.495	1.552	1.623	1.684	2.070
Pekerja Konstruksi (Construction Worker)	64	40	33	42	43
Pekerja Jasa (Service Worker)	1.373	1.164	1.271	1.479	1.670
Lainnya	3.847	2.906	3.323	3.274	3.520
Jumlah	20.241	14.195	13.754	14.051	17.710

Sumber: Kementerian Kehakiman, Biro Imigrasi, Laporan Pengawasan Imigrasi (*Immigration Control Report: 2005, 60*)

Jenis pekerjaan yang masih banyak diisi oleh pekerja migran perempuan illegal pada tahun 2000an adalah sebagai pelayan bar (*hostess*). Seperti yang terlihat dari tabel di atas, dari total jumlah keseluruhan pekerja migran perempuan illegal sebesar 20.241 orang, jumlah pekerja migran perempuan yang mengisi posisi tersebut pada tahun 2000 mencapai 9.056 orang. Kemudian jenis pekerjaan kedua yang juga banyak diisi oleh para pekerja migran perempuan illegal adalah bekerja sebagai pekerja pabrik (*factory worker*). Hal yang sama juga terjadi pada jenis pekerjaan sebagai pelayan restoran (*waitress*). Kedua jenis pekerjaan ini

tidak banyak mengalami fluktuasi sejak tahun 1992 (Tabel 2.3) hingga 2004 (Tabel 2.4).

3.1.5 Upah Pekerja Migran Perempuan

Tabel 3.5 Upah Harian Pekerja Migran Illegal Menurut Jenis Kelamin
(1991-1998)

Tahun	Jenis Kelamin	≤3.000 yen	≤5.000 yen	≤7.000 yen	≤10.000 yen	≤30.000 yen	≥30.000 yen	Tidak Diketahui
1991	L	112	753	4.768	16.484	3.005	33	195
	P	358	1.466	2.011	2.180	766	188	589
1992	L	153	1.061	7.522	31.099	7.250	35	401
	P	412	2.352	4.519	3.943	2.240	262	912
1993	L	151	1.321	7.789	28.390	7.013	80	400
	P	525	3.272	5.698	5.117	2.998	336	1.251
1994	L	153	1.589	7.504	24.183	6.012	269	319
	P	480	3.323	6.077	5.714	2.482	265	982
1995	L	130	1.501	6.416	18.206	5.373	77	403
	P	469	3.169	5.864	5.058	1.910	116	742
1996	L	163	1.259	5.181	17.396	6.813	57	291
	P	496	2.580	5.282	5.360	2.311	96	500
1997	L	643	3.109	3.947	14.821	2.966	53	242
	P	1.586	3.889	2.396	5.626	1.716	161	449
1998	L	94	920	5.320	14.151	3.671	79	573
	P	353	2.074	5.052	5.552	1.850	180	666

Sumber: Kementrian Kehakiman, Biro Imigrasi (Sellek:2001, 102-103)

Keterangan: Upah harian ini adalah hasil konversi dari upah bulanan, upah mingguan dan upah per jam.

Tabel di atas menjelaskan tentang upah harian yang diterima oleh pekerja migran illegal menurut jenis kelamin dari tahun 1991-1998. Menurut tabel di atas, upah harian yang diterima oleh pekerja migran illegal perempuan paling banyak adalah sekitar 10.000 yen pada tahun 1991 dan 1996-1998. Sedangkan pada tahun 1992 hingga 1995, upah harian yang diterima oleh pekerja migran perempuan illegal adalah sekitar 7.000 yen.

3.2 Pekerja Migran Perempuan Filipina di Jepang

3.2.1 Masuknya Pekerja Migran Perempuan Filipina ke Jepang

Pada kasus migrasi pekerja migran Filipina, perempuan dan laki-laki tersebar ke wilayah yang berbeda. Para perempuan bermigrasi ke wilayah yang memiliki jumlah permintaan yang besar terhadap pekerja di sektor hiburan dan sektor jasa. Sedangkan para laki-laki biasanya disalurkan ke wilayah sektor pekerjaan produksi berat dan konstruksi (Parrenas, 2001, hal.38). Fakta tersebut didukung pula oleh pernyataan Tyner (1994 dan 1996) bahwa terdapat daerah tujuan serta jenis pekerjaan yang berbeda bagi pekerja migran Filipina. Realisasinya, pekerja migran laki-laki Filipina bermigrasi ke daerah Timur Tengah atau negara-negara penghasil minyak dan bekerja sebagai pekerja konstruksi di sana. Sedangkan pekerja migran perempuan Filipina bermigrasi ke negara-negara Asia, Amerika Utara dan Eropa sebagai pekerja domestik dan perawat, tetapi pada kasus Jepang, pekerja migran perempuan Filipina ini mengkhususkan diri untuk bekerja di bidang hiburan (*entertainment*) sebagai penghibur (*entertainer*) (Abe, 2008, hal.70).

Susunan dari populasi migran Filipina menurut jender di beberapa negara pun tidaklah sejenis. Di kala laki-laki menjadi mayoritas dari pekerja migran Filipina di Timur Tengah, pekerja migran perempuan Filipina menjadi mayoritas di negara yang lain (Parrenas, 2001, hal.38).

Latar belakang masuknya pekerja migran Filipina ke Jepang dimulai pada saat pemerintah Filipina merencanakan sebuah strategi dalam rangka mengeksport warga negaranya untuk bekerja ke luar Filipina pada tahun 1970, hal ini terjadi bersamaan dengan memburuknya ekonomi nasional Filipina dan keadaan politiknya⁵ Pada tahun 1974, dibentuklah Undang-undang Tenaga Kerja (*Labor Code*)⁶ dan Dewan Pengembangan Tenaga Kerja ke Luar Negeri (*Overseas*

⁵ Keadaan ekonomu Filipina sejak tahun 1970 belum mengalami pertumbuhan yang cepat. Dalam level makro, terjadi fluktuasi pada penanaman modal swasta dan pemerintah Filipina mengalami defisit anggaran. Sementara itu keadaan politiknya pun tidak stabil (Bautista, 2003).

⁶ Undang-undang Tenaga Kerja Filipina (*Labor Code*) merupakan dekrit yang isinya adalah kewenangan untuk merevisi, mengkonsolidasikan tenaga kerja dan undang-undang sosial untuk mendapatkan perlindungan terhadap tenaga kerja, mempromosikan pekerjaan serta pengembangan sumber daya manusia dan memastikan kedamaian industri berdasarkan keadilan sosial.

Employment Development Board)⁷ Setelah itu, didirikanlah Administrasi Tenaga Kerja Filipina di Luar Negeri (*Philippine Overseas Employment Administration*)⁸ (Abe, 2008, hal.70).

Kelompok pekerja migran perempuan Filipina yang berprofesi sebagai penhibur (*entertainer*) yang disebut juga sebagai seniman yang tampil di luar negeri (*overseas performing artist*) mulai masuk ke Jepang sekitar tahun 1980an secara resmi di bawah pengawasan pemerintah Filipina. Sementara peraturan keimigrasian Jepang tidak memperbolehkan pekerja migran Filipina yang bekerja di bidang pekerjaan domestik (*domestic worker*) masuk dan bekerja di Jepang, para pekerja migran Filipina yang berprofesi sebagai penhibur (*entertainer*) dan mayoritasnya adalah perempuan justru sebaliknya, mereka diterima untuk bekerja di Jepang sebagai penari atau penyanyi.

Arus pekerja migran Filipina yang mayoritasnya adalah perempuan dan bekerja sebagai penhibur (*entertainer*) mulai meningkat pada tahun 1980an ketika keadaan Jepang pada saat itu diakui sebagai negara yang sukses dalam bidang ekonomi, makmur, dan terjadi peningkatan pada nilai yen. Kondisi puncaknya terjadi pada tahun 1990an ketika Jepang mengalami masa ekonomi gelembung (*bubble economy*)⁹ (Tabel 2.6).

Namun keadaan tersebut tidak berlangsung lama. Akibat adanya insiden tewasnya seorang pekerja migran perempuan Filipina yang bekerja sebagai penhibur (*entertainer*) di Jepang pada bulan September tahun 1991, pemerintah Filipina mengeluarkan peraturan yang ketat dan pembatasan terhadap pengiriman pekerja Filipina ke Jepang pada bulan Desember di tahun yang sama. Implikasinya dapat terlihat pada penurunan jumlah pekerja migran perempuan Filipina di Jepang tahun 1992 sampai tahun 1993 (Tabel 2.6).

⁷ OEDB (*Overseas Employment Development Board*) dibuat dengan tujuan untuk menjalankan, berkerja sama dengan hal-hal yang berkaitan dan agensi-agensinya, sebuah program sistematis untuk tenaga kerja Filipina di luar negeri melebihi kebutuhan domestik dan untuk melindungi hak-hak mereka terhadap pekerjaan yang adil dan pantas.

⁸ POEA (*Philippines Overseas Employment Administration*) didirikan pada tahun 1982. POEA memiliki fungsi-fungsi utama, yaitu fungsi yang berkaitan dengan peraturan-peraturan industri, fasilitas tenaga kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

⁹ Era 'gelembung' di Jepang terjadi pada tahun 1986-1991. Era ini berasal dari apresiasi yang sangat tinggi pada harga asset yang terjadi pada akhir tahun 1980an. Secara umum, 'gelembung' ini merupakan hasil dari kombinasi pertumbuhan ekonomi yang kuat, inflasi yang rendah serta ekspansi yang menjadi-jadi atas permintaan uang dan kredit (Kingston, 2004.hal. 4-5)

Selanjutnya pada tahun 1994, jumlah pekerja perempuan migran Filipina yang masuk menggunakan visa hiburan (*entertainment visa*) kembali meningkat menjadi 53.704 orang. Di tahun yang sama, pemerintah Filipina mengeluarkan ARB (*Artist Record Book*)¹⁰ yang berakibat pada menurunnya jumlah pekerja migran perempuan Filipina yang masuk ke Jepang dengan visa hiburan (*entertainment visa*) pada tahun 1995 hingga 1996, di mana jumlah mereka menurun dari menjadi hanya 18.905 orang pada tahun 1996 (Tabel 2.6).

3.2.2 Faktor Pendorong Migrasi Pekerja Perempuan Filipina ke Jepang

Mengenai migrasi perempuan Filipina, faktor struktur penduduknya memiliki peran yang penting. *Bubble economy*, turunnya angka kelahiran, populasi masyarakat lansia, kurangnya pekerja muda dan banyaknya sektor pekerjaan kasar telah menciptakan kekurangan pekerja terutama sektor konstruksi, industri manufaktur skala kecil, dan sektor jasa.

Hal ini kontras dengan kondisi Filipina. Filipina adalah negara yang pertumbuhannya cepat, termasuk negara miskin, memiliki banyak stratifikasi dalam masyarakatnya serta merupakan negara yang masih berkembang. Selain itu, Filipina memiliki kondisi ekonomi yang lemah, pertumbuhan ekonomi yang rendah (terjadi inflasi dan deflasi pada tahun 1980an), memiliki kelebihan tenaga kerja yang pada akhirnya memunculkan banyaknya pengangguran, memiliki upah yang rendah dan terhimpit kemiskinan (Anderson, 2009, hal.4). Dengan adanya perbedaan itu, terutama pada keadaan ekonomi, membuat perempuan Filipina berusaha mencari peluang dan bermigrasi ke Jepang untuk mencari kesempatan memperbaiki hidup. Menurut data dari POEA mengenai faktor pendorong untuk bekerja di Jepang, 84 persen pekerja perempuan migran Filipina memilih alasan ekonomi dan 16 persen memilih alasan psikologi-sosial (Nuqui, 2004, hal.4)

Pilihan para pekerja migran perempuan Filipina untuk bekerja di bidang hiburan di Jepang merupakan pilihan yang rasional bagi mereka. Pilihan yang

¹⁰ ARB (*Artist Record Book*) ini adalah dokumen yang ditujukan untuk para penampil (performing artist) dalam rangka menguji kompetensi mereka. ARB ini berisi informasi mengenai data pribadi mereka serta mengenai data lain, yaitu data mengenai pelatihan, kemampuan akademik, tes kemampuan, penempatan di luar negeri dan agensi yang bersangkutan.

rasional ini berdasarkan kebutuhan keluarga yang mendesak, ketidak tersediaan atas kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang cocok di Filipina dan sebagai pilihan alternatif untuk memperbaiki keadaan finansial mereka. Beberapa di antara mereka juga terdesak untuk mencari pekerjaan di Jepang secepat mungkin dengan tujuan untuk memperoleh uang biaya pengobatan anggota keluarganya, membayar utang dan memenuhi kebutuhan yang mendesak (Anderson, 2009, hal.9)

Para pekerja migran perempuan Filipina ini awalnya lulus dari sekolah dan pergi ke daerah urban untuk mencari pekerjaan yang layak. Namun ternyata tidak menemukan pekerjaan yang layak dan cocok sehingga memutuskan untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Dengan kata lain, mayoritas dari mereka memilih untuk bekerja di Jepang karena tidak memiliki opsi lain dengan kurangnya kesempatan dalam ekonomi dan lingkungan mereka yang pada akhirnya membuat mereka berkeinginan untuk meninggalkan kehidupan dan status mereka untuk bekerja sebagai penghibur (*entertainer*) di Jepang dan menghadapi resiko serta kesulitan selama mereka bekerja di Jepang (Anderson, 2009, hal.9-10).

3.2.3 Jumlah Pekerja Migran Perempuan Filipina yang Masuk ke Jepang

Pekerja migran yang bekerja di bidang hiburan (*entertainers*) memiliki bagian yang besar dalam jumlah pekerja migran yang bekerja di Jepang. Pada tahun 2003, sebesar 133.103 penghibur tiba di Jepang di mana 60 persen dari keseluruhan jumlah tersebut yaitu sebesar 80.048 ialah warga negara Filipina. Mayoritas dari mereka ialah perempuan muda yang belum menikah. Kebanyakan dari mereka berkerja dengan upah kurang dari 1.500 dollar Amerika setiap bulannya, upah bulanan minimum resmi yang ditetapkan oleh pemerintah Filipina bagi pekerja di bidang hiburan. Ada pula di antara mereka yang bekerja dengan upah sebesar 350 dollar Amerika setiap bulannya. Para perempuan yang bekerja di bidang ini biasanya bekerja sebagai penampil (*performers*), tapi kebanyakan di antara mereka direkrut untuk melayani tamu sebagai pelayan bar atau pekerja prostitusi. Menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Kehakiman menyatakan bahwa 81,6 persen dari jumlah pekerja perempuan Asia yang tiba di

Jepang dengan visa hiburan (*entertainment visa*) sebenarnya bekerja sebagai pelayan di bar dan pub (*hostess*) (*Asian Development Bank*, 2006). Mayoritas pekerja migran perempuan Filipina masuk ke Jepang menggunakan visa hiburan (*entertainment visa*). Hal ini terlihat pada tahun 1987 sejak awal kemunculannya hingga tahun 1998. Fluktuasi jumlahnya pun dapat terlihat (Tabel 3.6).

Tabel 3.6 Pekerja Migran Perempuan dari Asia yang Masuk ke Jepang Melalui Visa Hiburan (*Entertainment Visa*) (1987-1998)

Tahun	Filipina	Korea Selatan	Taiwan	Lainnya	Jumlah
1987	36.039	827	2.515	1.881	41.262
1988	41.357	994	2.346	3.253	47.950
1989	32.636	1.643	1.962	2.016	38.257
1990	42.738	2.352	2.066	2.212	49.368
1991	56.851	2.753	2.021	2.471	64.078
1992	50.976	2.655	1.610	3.390	58.531
1993	42.612	2.216	1.379	3.660	49.867
1994	53.704	2.797	1.331	3.297	61.129
1995	24.022	2.185	1.279	3.930	31.416
1996	18.905	1.552	830	2.874	24.161
1997	31.585	2.599	1.419	3.316	38.919
1998	36.550	2.764	1.255	3.395	43.964

Sumber: Kementerian Kehakiman, Biro Imigrasi (Sellek:2001, 90)

Dari tabel di atas, dapat dibandingkan antara jumlah pekerja migran perempuan Filipina yang masuk ke Jepang melalui visa hiburan (*entertainment visa*) dengan negara Asia lainnya, yaitu Korea Selatan dan Taiwan. Terdapat perbedaan yang sangat kontras dalam jumlahnya. Pekerja migran perempuan Filipina yang masuk ke Jepang dengan menggunakan visa ini berjumlah hampir lebih dari 30.000 orang tiap tahunnya, kecuali pada tahun 1995-1996 dimana terjadi penurunan jumlah yang signifikan. Jumlah terbanyak pekerja migran perempuan Filipina yang masuk ke Jepang berada pada tahun 1991, yaitu dari 64.078 orang pekerja migran perempuan Asia yang datang ke Jepang, 56.851 orang berasal dari Filipina (sekitar 80 persen). Sementara pada kasus Korea Selatan dan Taiwan, jumlah pekerja migran perempuan yang masuk ke Jepang

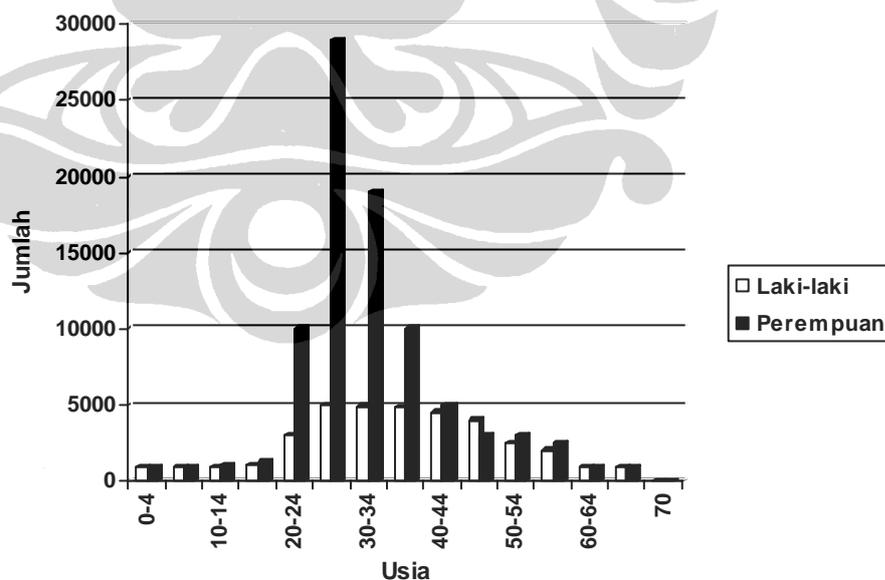
menggunakan visa ini rata-rata berjumlah tidak lebih dari 3.000 orang setiap tahunnya.

3.2.4 Usia Pekerja Migran Perempuan Filipina di Jepang

Menurut Abe Ryogo (2008), karakteristik dari pekerja migran Filipina, selain mayoritas dari mereka adalah perempuan dan masuk melalui visa hiburan (*entertainment visa*), dari segi usia pun tergolong muda.

Komai (1993) juga menyatakan bahwa beberapa karakteristik dari pekerja asing Filipina ialah bahwa usia mereka berkisar dari 25 tahun hingga 39 tahun di mana mayoritas usia dari pekerja perempuannya berkisar antara 25 tahun dan 29 tahun, telah menyelesaikan pendidikan menengah di mana sebagian besar dari pekerja perempuan ialah lulusan universitas, dua per tiga berasal dari daerah Metro Manila dan hampir 70 persen pernah bekerja sebelum datang ke Jepang (Komai, 1993, hal.169).

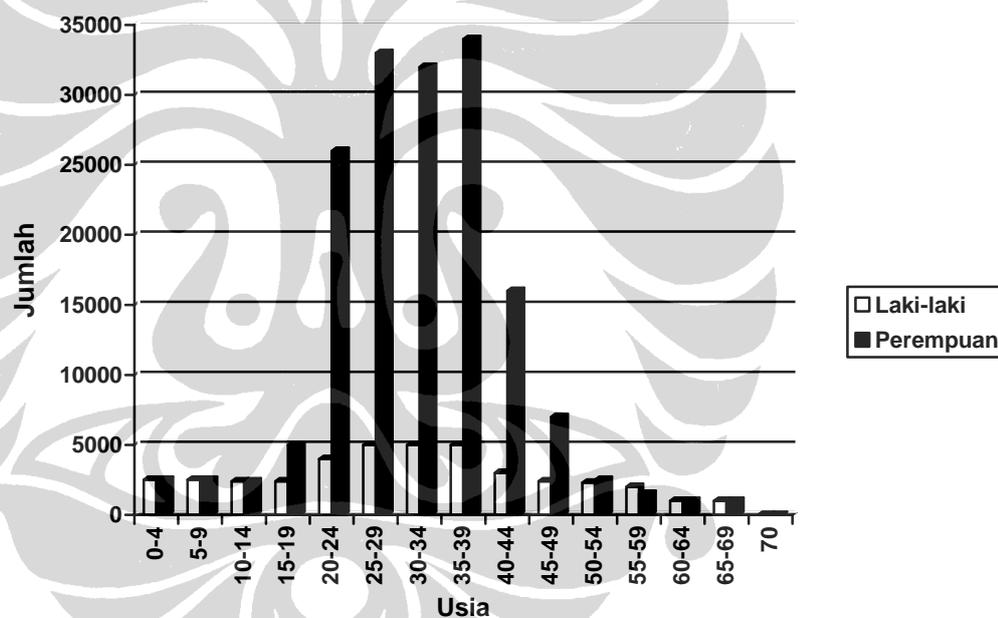
Grafik 3.1 Jumlah Migran Legal Filipina Sesuai Usia dan Jenis Kelamin yang Masuk ke Jepang Tahun 1997



Sumber: Kementerian Kehakiman, Laporan Tahunan Statistik Migran Legal, 1997 (Douglas dan Glenda Roberts, 2000, hal.104).

Menurut grafik 3.1, dapat terlihat bahwa jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah perempuan yang bermigrasi dari Filipina ke Jepang. Dari segi usia pun, terdapat perbedaan. Perempuan yang masuk ke Jepang berusia antara 20 sampai 30 tahun. Jumlah usia tertinggi yang masuk ke Jepang adalah golongan usia 25-29 tahun yang berjumlah hampir 30.000 orang. Sedangkan golongan usia termuda adalah usia 20-24 tahun berjumlah mendekati 10.000 orang dan golongan usi tertua adalah usia 30-34 tahun berjumlah 20.000 orang. Namun terjadi pergeseran usia dari tahun 1996 ke tahun 2004 (Grafik 3.2)

Grafik 3.2 Jumlah Migran Legal Filipina Sesuai Usia dan Jenis Kelamin yang Masuk ke Jepang Tahun 2004



Sumber: Kementerian Kehakiman, Statistik Penduduk Asing di Jepang, 2004 (Abe, 2008, hal.69).

Terdapat empat kelompok usia bagi perempuan Filipina yang masuk ke Jepang. Pertama, kelompok usia 35-39 tahun yang berjumlah 35.000 orang. Kedua, kelompok usia 25-29 tahun yang berjumlah sekitar 33.000 orang. Ketiga, kelompok usia 30-34 tahun berjumlah sekitar 32.000 orang. Keempat, kelompok usia 20-24 tahun berjumlah sekitar 26.000 orang. Hal ini berbeda dengan keadaan pada tahun 1996 (Grafik 3.1) yang menyatakan bahwa usia terbanyak yang masuk

ke Jepang berkisar antara usia 25-29 tahun. Jika dibandingkan dengan tahun 2004, jumlah migran perempuan yang berusia muda yang masuk ke Jepang tahun 1996 lebih tinggi (35.000 orang). Ini menyatakan bahwa ada sedikit pergeseran usia perempuan migran yang masuk ke Jepang dari tahun 1996 dan tahun 2004.

3.2.5 Pekerja Migran Perempuan Filipina Sebagai Penghibur (*Entertainer*) di Jepang

Salah satu karakteristik dari pekerja migran Filipina selain sebagian besar dari mereka adalah perempuan, mayoritas dari mereka masuk ke Jepang untuk bekerja sebagai penghibur (*entertainer*) menggunakan visa hiburan (*entertainment visa*). (Abe, 2008, hal.71). Visa jenis ini berkaitan dengan jenis pekerjaan sebagai aktor, penyanyi, penari dan atlet profesional (*Ministry of Justice, Immigration Control, Data Section*, 2005 hal.200). Para pekerja migran perempuan Filipina ini disebut juga sebagai *Overseas Performing Artist (OPA)* (Nuqui, 2004, hal. 3).

Warga negara Filipina tiba di Jepang dengan jumlah yang signifikan pada awal tahun 1980an seiring dengan tumbuhnya permintaan untuk bekerja sebagai penari yang berhubungan dengan kebudayaan mereka, penyanyi, dan pelayan di bar serta klub. Menurut Shimada, lebih dari setengah dari jumlah pekerja migran diklasifikasikan sebagai penghibur (*entertainer*) yang mayoritas dari mereka bekerja sebagai penyanyi dan penari berasal dari Filipina. Banyaknya pekerja migran yang mengisi bidang itu diperkuat oleh pernyataan Komai (1993) bahwa banyak perempuan Jepang yang menghindari untuk bekerja di bidang ini di saat jumlah permintaan terhadap pekerja untuk mengisi di bidang hiburan itu semakin tinggi (Anderson, 2009, hal.2).

Untuk dapat bekerja di Jepang sebagai penghibur (*entertainer*), para perempuan Filipina harus menjalani ujian seleksi yang diadakan oleh Administrasi Tenaga Kerja Filipina Di Luar Negeri (*Philippines Overseas Employment Administration*).

Setelah sampai di Jepang, para pekerja migran perempuan Filipina ini akan dipekerjakan di klub malam sebagai penyanyi dan penari setiap malamnya. (Abe, 2008, hal.72). Ada kalanya mereka juga harus menemani para tamu yang

sebagian besar adalah laki-laki, berbincang-bincang dengan mereka dan menyuguhkan minuman (Anderson, 2009, hal.7).

Pekerjaan di bidang hiburan ini berkaitan pula dengan peran dari Kementerian Kehakiman Jepang dan pemerintah Filipina. Pada tahun 1995, Kementerian Kehakiman (*The Ministry of Justice*) dan Administrasi Tenaga Kerja Filipina Di Luar Negeri (*Philippines Overseas Employment Administration*) mulai mengatur dengan selektif pekerja Filipina yang akan bekerja di bidang hiburan melalui sistem yang diperkenalkan oleh pemerintah Filipina pada bulan Oktober tahun 1994, yaitu sistem *Artist Record Book*¹¹. Sistem yang mulai diberlakukan pada bulan Januari tahun 1995 ini dibuat dengan tujuan untuk memperbaiki standar keprofesionalan dari para pekerja Filipina yang akan bekerja di bidang hiburan (*entertainer*). Akibat dari diberlakukannya sistem ini, jumlah pekerja yang membuat visa hiburan (*entertainment visa*) di Kedutaan Jepang menurun, konsekuensinya sekitar 800 agensi penyalur tenaga kerja Filipina yang biasa mengirim pekerja-pekerja bidang hiburan ke Jepang mengalami kesulitan (Sellek, 2001, hal.114).

Selanjutnya, pada tanggal 13 Juli 1995 pemerintah Filipina mengumumkan rencananya berupa larangan terhadap tenaga kerja Filipina yang tidak ahli (*unskilled*) termasuk pekerja perempuan yang akan bekerja di bidang hiburan untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu lima tahun setelah larangan ini diumumkan. Ada harapan dari pemerintah Filipina bahwa dengan semakin sulit dan kompetitifnya prosedur dari sistem ARB ini, diharapkan mampu mengembalikan “kehormatan” pekerja Filipina sebagai penghibur (*entertainer*) dan bahwa dengan mempelajari berbagai jenis undang-undang atau hukum Jepang sebagai persiapan menghadapi ujian tertulis akan menjadi sebuah keuntungan bagi mereka supaya dapat menghindari perlakuan yang tidak menyenangkan di Jepang. Sehubungan dengan hal ini, pada bulan Februari tahun 1995, Biro Imigrasi dari Kementrian Kehakiman (*Immigration Bureau of Ministry of Justice*) melakukan

¹¹ Sistem *Artist Record Book* adalah sisitem pelatihan, ujian sertifikasi dan penempatan bagi penampil (*performing artist*) yang dibuat untuk memperbaiki dan mengembangkan industri hiburan (*entertainment industry*) di luar negeri melalui pengembangan kemampuan dan seleksi ketat bagi calon pekerja. ARB menggantikan sertifikat AAC (*Artist Accreditation Certificate*) yang diberikan kepada penghibur (*entertainer*) atau penampil (*performing artist*) yang lulus ujian POEA (*Philippines Overseas Employment Administrartion*).

pemeriksaan ('spot-checks') di bar atau restoran yang mempekerjakan tenaga kerja asing untuk mengetahui apakah para pekerja tersebut memang bekerja sesuai dengan keterangan pada visa mereka (Sellek, 2001, hal.114).

Setelah mengetahui tentang gambaran umum dari pekerja migran perempuan Filipina di Jepang, maka pada bab selanjutnya akan dianalisa mengenai bentuk eksklusi sosial yang dialami oleh pekerja migran perempuan Filipina di Jepang dan hubungannya dengan pembangunan wilayah yang tidak seimbang.



BAB 4

EKSKLUSI SOSIAL TERHADAP PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN FILIPINA DI JEPANG DAN HUBUNGANNYA DENGAN PEMBANGUNAN WILAYAH TIDAK SEIMBANG (*UNEQUAL DEVELOPMENT REGION*)

4.1 Konsep Eksklusi Sosial

Eksklusi menurut David Byrne adalah “sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang lain”. Semua argumentasi mengenai eksklusi sosial termasuk pada pengertian yang luas, yaitu sebuah keadaan yang tidak menguntungkan bagi seseorang di dalam masyarakat. Contohnya, dieksklusi secara sosial terjadi pada individu yang tidak bekerja (*unemployed*); individu yang tidak memiliki peran dalam sistem ekonomi formal, individu yang tidak terdaftar dan memiliki hak suara; individu yang tidak memiliki peran dalam sistem politik, kaum tua yang terisolasi; individu yang hidup sendiri dan tidak memiliki peran dalam sistem sosial (Haralombos dan Holborn, 2004, hal.251).

Pada akhirnya oleh David Bryne, eksklusi sosial dapat didefinisikan sebagai proses multi-dimensional yang terkombinasi dan terdiri atas beberapa bentuk, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses politik, akses untuk mendapat pekerjaan dan sumber penghasilan, dan integrasi ke dalam proses kultural (Bryne, 2005, hal.2). Definisi ini menekankan pada pentingnya ketidaksetaraan materi (*material inequality*) dan ketidaksetaraan kekuasaan (*inequalities of power*). (Haralombos dan Holborn, 2004, hal.252). Seperti yang telah dipaparkan oleh David Byrne, maka bentuk-bentuk eksklusi sosial yang akan dianalisa adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan (*participation in decision making*), akses untuk mendapat pekerjaan dan sumber penghasilan (*access to employment and material resources*) serta ketiadaan tempat tinggal yang layak (*a lack of decent housing*).

4.2 Eksklusi Sosial Terhadap Pekerja Migran Perempuan Filipina di Jepang dan Hubungannya dengan Pembangunan Wilayah yang Tidak Seimbang (*Unequal Development of Regions*)

Eksklusi sosial yang dialami oleh pekerja migran perempuan Filipina di Jepang serta hubungannya dengan pembangunan wilayah yang tidak merata (*unequal development region*) sebagai bagian dari proses makro globalisasi (*macroprocess of globalization*) dapat dianalisa melalui beberapa dimensi sesuai dengan konsep eksklusi sosial itu sendiri. Karena pembangunan wilayah yang tidak seimbang memunculkan ketidak setaraan kekuasaan (*inequalities of power*) antara subjek dan objek eksklusi sosial, maka dimensi yang akan digunakan untuk menganalisa eksklusi sosial terhadap pekerja migran perempuan Filipina ini mengacu pada definisi eksklusi sosial yang diungkapkan oleh David Byrne, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, akses untuk mendapatkan pekerjaan dan sumber penghasilan, dan ketiadaan tempat tinggal yang layak.

4.2.1 Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan (*Participation on Decision Making*)

Eksklusi sosial yang dialami oleh pekerja migran perempuan Filipina di Jepang yang akan dianalisa melalui bentuk partisipasi dan pengambilan keputusan ini adalah tiadanya partisipasi mereka dan pengambilan keputusan dalam menentukan jam kerja serta upah yang mereka terima.

Kasus ini merupakan hasil observasi yang dilakukan oleh Parrenas terhadap seorang pekerja migran perempuan Filipina yang bekerja di Tokyo dan hasilnya ditulis dalam jurnalnya yang berjudul "*Trafficked? Filipina Hostess in Tokyo Nightlife Industry*"

Kay adalah seorang perempuan Filipina berusia 20 tahun yang dikontrak untuk bekerja selama enam bulan sebagai penghibur

(*entertainer*) di sebuah pub Filipina yang berlokasi di sebuah distrik kelas pekerja di Tokyo. Kay menerima upah sebesar 60.000 yen perbulan. Namun, upah tersebut baru akan dibayar pada saat kontraknya habis dan masa kerjanya pun berakhir. Sesungguhnya, upah sebesar 60.000 yen itu jauh dari jumlah upah minimal yang seharusnya diterima oleh pekerja migran yang bekerja sebagai penghibur (*entertainer*), yaitu 200.000 yen. Namun jumlah 60.000 yen itu mendekati jumlah upah rata-rata yang diterima oleh pekerja kontrak Filipina di industri malam Jepang. Ia hidup bertahan menggunakan uang tip dan bonus yang diberikan oleh pelanggannya. Untuk pekerja kontrak seperti Kay, ia mendapat upah sebesar 60.000 yen setiap bulan. Jika ia berhasil memenuhi kuota berupa delapan belas poin setiap sepuluh hari ia akan menerima 18.000 yen, tetapi jika ia tidak berhasil memenuhinya, maka upahnya akan dipotong sebanyak setengah dari upah yang ia terima. Kay menerima bonus sebesar 10.000 yen jika ia mampu memenuhi kuota tiga puluh poin dan mendapat tunjangan untuk makan sebesar 5000 yen. Namun, Kay dan pekerja migran perempuan Filipina lainnya yang bekerja di klub, tidak berarti lepas dari potongan-potongan lain (penalti) berupa pemotongan sebesar 5000 yen jika kelebihan berat badan satu kilogram. Mereka juga tidak diperbolehkan cuti sakit. Meninggalkan pekerjaan mereka pada malam hari berakibat pada pemotongan upah sebesar 8.000 yen. (Parrenas, 2008, hal.5;14-15).

Pembangunan wilayah yang tidak merata (*unequal development regions*) yang merupakan bagian dari proses makro globalisasi (*macroprocess of globalization*), berakibat pada munculnya ketidak setaraan kekuasaan (*inequalities of power*) antara warga negara *host* (negara yang mempekerjakan warga negara *home*) dan warga negara *home* (negara yang warga negaranya dipekerjakan di negara *host*). Dampaknya muncul pada perbedaan perlakuan terhadap pekerja

migran perempuan Filipina di Jepang oleh orang yang mempekerjakan mereka (*employer*) di Jepang.

Sesuai dengan konsep eksklusi sosial yang dinyatakan oleh David Byrne, maka apa yang terjadi dalam kasus Kay ini merupakan eksklusi sosial yang terjadi akibat adanya perbedaan kekuasaan antara Kay dan promotor Jepang, manajer serta pemilik klub tempat ia bekerja sebagai pelayan bar (*hostess*). Kay sebagai individu tidak memiliki partisipasi dalam pengambilan keputusan. Contohnya adalah ketika upahnya tidak dibayarkan hingga masa kontraknya berakhir, potongan-potongan upah yang tidak bisa dibantah. Ia pun dipaksa untuk menerima upah yang lebih rendah dari standar upah bagi pekerja kontrak Filipina di luar negeri. Ia pun tidak bisa mempertanyakan hal itu dan hanya menerima segala keputusan yang diambil oleh orang yang mempekerjakannya. Semua keputusan berada di tangan *employer*¹² sehingga membuat Kay berada di dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dengan demikian, Kay tereksklusi secara sosial dengan adanya pembagian upah yang tidak jelas dan lebih kecil dari pada yang seharusnya ia terima.

Selanjutnya, jam kerja yang tidak jelas pun dapat menjadi suatu bentuk eksklusi sosial terhadap pekerja migran perempuan Filipina seperti yang terjadi pada kasus berikut :

Lisa, seorang pekerja migran perempuan Filipina bekerja di sebuah klub di Okinawa. Jam kerjanya ditentukan oleh pemilik klub dan berhubungan dengan aktifitas militer. Biasanya, klub tersebut buka sekitar pukul 18.30 atau pukul 19.30, pada saat tentara militer menerima gaji (*paydays*) jam operasional klub tersebut akan dimulai lebih cepat sekitar pukul 17.00. Klub itu akan terus buka hingga pukul 02.00, tapi pada saat hari saat tentara militer menerima gaji (*paydays*) klub itu akan beroperasi sepanjang malam dan tidak tutup sampai pukul 08.00. Meskipun tidak ada

¹² Penting untuk disadari bahwa yang dimaksud dengan *employer* pada studi ini adalah orang-orang yang mempekerjakan pekerja migran perempuan Filipina dalam industri hiburan (*entertainment*). *Employer* yang dimaksud adalah pemilik bar atau pub dan agen penyalur (*broker*) yang memang berkecukupan di dalam industri tersebut.

pelanggan di klub, Lisa dan penari lainnya tidak diperbolehkan tidur atau istirahat pada masa bekerjanya (*shift*) (Tyner, 2004, hal.124-125).

Dari contoh kasus di atas, jam bekerja Lisa ditentukan oleh pemilik klub. Ia harus bekerja sekitar tujuh jam pada hari normal sedangkan pada hari di saat tentara militer menerima gaji, jam kerjanya menjadi jauh lebih lama sampai klub tersebut tutup. Hal ini menunjukkan bahwa Lisa tidak memiliki akses untuk menentukan jam kerjanya. Sama seperti apa yang terjadi pada Kay, Lisa pun berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, yang membuatnya tereksklusi secara sosial.

4.2.2 Akses untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Sumber Penghasilan (*Access to Employment and Material Resources*)

Eksklusi sosial yang dialami oleh pekerja migran perempuan Filipina di Jepang yang akan dianalisa melalui tiadanya akses untuk mendapatkan pekerjaan dan sumber penghasilan, dilihat dari status illegal dan pekerjaan mereka di bidang hiburan (*entertainment*) di Jepang. Orang yang mempekerjakan mereka memiliki peluang untuk menentukan kondisi pekerjaan yang akan mereka kerjakan dengan mengatur upah mereka, menciptakan deskripsi pekerjaan dan menentukan struktur pekerjaan mereka (Parrenas, 2001, hal. 164) Seperti yang ditunjukkan pada contoh kasus berikut ini :

Rosa (bukan nama sebenarnya) seorang *Overseas Performing Artist* (OPA) yang bekerja di sebuah klub di Gunma pada tahun 2000. Ketika pertama kali tiba di Jepang, ia mengalami malpraktik yang dilakukan oleh promotornya yaitu dengan memaksa melibatkannya pada *dohan* (menghabiskan waktu dengan pelanggan, baik diluar maupun di dalam klub), pemindahan pekerjaan ke tempat lain (*flying booking*), dan mengalami

penundaan pembayaran upah. (*Development Action For Women Network* (DAWN), 2003).

Pada kasus Rosa, yang terjadi adalah ia harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berhubungan dengan apa yang seharusnya ia kerjakan sesuai dengan visa yang ia gunakan. Apa yang terjadi pada Rosa merupakan bentuk dari eksklusivitas sosial yang menggambarkan adanya tidak adanya akses untuk mendapatkan pekerjaan serta sumber pendapatan lain selain pekerjaan yang terpaksa ia terima. Seharusnya, sebagai OPA, ia berhak atas pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh seorang penampil atau seniman, yaitu menyanyi dan menari.

Para pekerja migran perempuan mengalami kesulitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi atas kategori visa yang mereka gunakan untuk bekerja, yaitu “visa hiburan” (*entertainment visa*). Faktanya, bakat mereka tidak digunakan selama mereka bekerja bar Filipina di Jepang sebagai penghibur (*entertainer*). Menurut ketentuan visa mereka, seharusnya mereka bekerja sebagai penyanyi, penari yang tampil di atas panggung, tapi sebaliknya, mereka bekerja sebagai pelayan bar (*hostess*) yang tugasnya menemani pelanggan, menyanyi dan menari di meja mereka (Parrenas, 2008, hal.4), seperti yang ditunjukkan oleh kasus berikut:

Dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh DAWN (*Development Action for Women Network*), para pekerja migran perempuan Filipina yang bekerja sebagai penghibur (*entertainer*) menyatakan bahwa promotor mereka di Jepang mengambil paspor mereka saat pertama kali mereka tiba di Jepang. Selanjutnya, pekerjaan mereka di klub tempat mereka bekerja selain menyuguhkan minuman untuk pelanggan, mereka juga harus menemani mereka, tapi mereka tidak pernah melakukan apa yang memang berkaitan dengan pekerjaan mereka sesuai *visa entertainment Development Action For Women Network* (DAWN), 2003).

Pada kasus di atas, pekerja perempuan migran Filipina yang disebut sebagai OPA, mengalami eksklusi sosial berupa tiadanya akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta sumber pendapatan lain. Sama seperti kasus yang menimpa Rosa. Pekerjaan perempuan migran Filipina pada akhirnya dibatasi. Pekerja migran perempuan tersebut dieksklusi secara sosial oleh orang yang mempekerjakan mereka (*employer*), terlebih dengan tindakan promotor mereka yang mengambil paspor sehingga mencegah para pekerja migran Filipina ini untuk mencari pekerjaan atau penghasilan yang lebih layak, yang sesuai dengan visa mereka. Orang yang mempekerjakan (*employer*) tersebut biasanya mengambil keuntungan dari ketergantungan pekerja migran perempuan Filipina ini terhadap status sah (*legal*) mereka dan menyalahgunakannya. Pada akhirnya, konsekuensi yang harus diterima oleh para pekerja migran perempuan Filipina itu adalah tiadanya sumber daya serta kebebasan untuk memilih pekerjaan (Parrenas, 2001, hal.168).

4.2.3 Ketiadaan Tempat Tinggal yang Layak (*A Lack of Decent Housing*)

Bentuk eksklusi sosial yang akan dianalisa adalah mengenai ketiadaan tempat tinggal yang layak bagi pekerja migran perempuan Filipina selama bekerja di Jepang. Berikut ini adalah contoh kasus yang menunjukkan bentuk eksklusi sosial, yaitu berupa ketiadaan tempat tinggal yang layak (*a lack of decent housing*).

Selanjutnya, contoh kasus ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh *International Organization for Migration* (Organisasi Internasional untuk Migrasi) tahun 1997 dengan pekerja migran Filipina yang dipaksa untuk bekerja di bidang prostitusi :

Pekerja migran perempuan Filipina diberi fasilitas berupa ruangan atau kamar tanpa jendela. Mereka tidak diperbolehkan untuk keluar dari tempat mereka tinggal tanpa dikawal dan orang yang mempekerjakan mereka (*employer*) menahan upah mereka sebanyak 75 persen dari jumlah upah yang seharusnya mereka terima. Hampir setengah dari jumlah pekerja migran perempuan

Filipina mengeluh soal kurangnya makanan dan fasilitas pemanas. Sebanyak lima puluh persen merupakan korban dari kekerasan fisik maupun psikologi. Dengan keadaan kerja demikian, banyak diantara mereka yang mencoba melarikan diri, beberapa berhasil melarikan diri dengan bantuan NGO, teman dan Kedutaan Besar Filipina (Douglas dan Glenda S.Roberts, 2000, hal.95).

Dari contoh kasus di atas, dapat dilihat bahwa keadaan tempat tinggal bagi pekerja migran Filipina yang terpaksa bekerja di bidang prostitusi ini sangat tidak layak. Mereka harus tinggal dalam ruangan tanpa jendela dengan fasilitas yang kurang. Apa yang terjadi pada mereka merupakan salah satu bentuk dari eksklusi sosial berupa tiadanya tempat tinggal yang layak (*a lack of decent housing*). Sesuai dengan konsep eksklusi sosial yang dipaparkan oleh David Byrne yang menekankan pada pentingnya ketidak setaraan materi serta ketidak setaraan kekuasaan, maka dari kasus di atas tergambar adanya perbedaan kekuasaan antara orang yang mempekerjakan pekerja migran perempuan Filipina tersebut (*employer*) terhadap pekerja migran perempuan Filipina sehingga mengakibatkan terjadinya eksklusi sosial.

Beberapa contoh kasus yang telah dipaparkan menggambarkan bentuk eksklusi sosial yang dialami oleh pekerja migran perempuan Filipina terutama yang dialami oleh pekerja di bidang hiburan (*entertainment*) di Jepang. Hal ini merupakan wujud dari adanya ketidak setaraan kekuasaan antara pekerja migran perempuan Filipina dengan orang yang mempekerjakan mereka (*employer*) di Jepang sebagai dampak dari pembangunan wilayah yang tidak seimbang (*unequal development regions*) antara Jepang dengan Filipina.